

**EVALUASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DALAM MENDORONG
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT STUDI DI KAMPUNG
TEMATIK TAHU TEMPE KOTA SEMARANG**

Nova Intan Kurniasari, Amni Zarkasyi Rahman

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Gumregah Tofu and Tempeh Thematic Village Program in Neighborhood Association (RW) 7, Lamper Tengah Village, Semarang City, using William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research method used was qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation with tofu and tempeh entrepreneurs, Semarang City Regional Development Planning Agency (Bappeda) officials and the village administration, and the local community. The results indicate that the thematic village program is conceptually relevant to the characteristics and potential of the region, but its implementation has not yet had a significant impact on increasing the capacity and economic independence of entrepreneurs and the wider community. Overall, the Gumregah Lamper Tengah Thematic Village Program has not been optimal in promoting local-based economic empowerment due to weak sustainability, mentoring, and active community involvement in all program stages.

Keywords: *Thematic Village, Policy Evaluation, Economic Improvement.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah di RW 7 Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang, dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha tahu tempe, perangkat Bappeda Kota Semarang dan kelurahan, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual program kampung tematik relevan dengan karakteristik dan potensi wilayah, namun dalam implementasinya belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi pelaku usaha maupun masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, Program Kampung Tematik Gumregah Lamper Tengah belum optimal dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal karena lemahnya keberlanjutan, pendampingan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program.

Kata kunci: Kampung Tematik, Evaluasi Kebijakan, Peningkatan Perekonomian.

PENDAHULUAN

Kemiskinan secara global masih menjadi masalah yang cukup serius dan menyita perhatian. Menurunkan angka kemiskinan sudah menjadi rencana dan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen atau setara dengan 23,85 juta penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2025). Angka ini merupakan yang terendah dalam dua decade terakhir dan menurun 0,10 poin persen dari September 2024 yang sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang. Penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,21 juta orang ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami *trend* penurunan yang signifikan pada setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 yaitu sebesar 23,85 juta orang, turun sebanyak 1,37 juta orang terhadap Maret 2025. Berada pada presentase 8,47%, menurun 0,56% terhadap periode Maret tahun 2024 lalu.

Terdapat perbedaan terkait jumlah persentase penduduk miskin antara di kota dan di desa. *Trend* penurunan terjadi di pedesaan di mana pada Maret 2025 sebesar 11,03%5 turun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perkotaan justru cenderung meningkat, pada Maret 2025 sebesar 6,73% naik dibandingkan September 2024 yaitu sebesar 6,66%. Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang melibatkan 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada Februari 2025. Perbedaan tingkat kemiskinan yang terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan ini dipengaruhi oleh faktor urbanisasi dan akses pekerjaan yang lebih baik di pedesaan hasil program infrastruktur. Meski demikian, disparitas

ini tetap menjadi tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan nasional.

Angka kemiskinan tertinggi yang pernah ada di Indonesia tercatat pada tahun 2020 yaitu ada di angka 9,78% dari yang sebelumnya berada pada 9,41% di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh anomaly yang terjadi di tahun 2020 yang di mana Indonesia harus menghadapi dampak ekstrem dari Covid-19, sehingga mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan di seluruh penjuru kota di Indonesia. Kondisi ini menempatkan banyak penduduk pada posisi rentan miskin yang kembali jatuh miskin dan diperkirakan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi selama 1-2 tahun mendatang. Hal ini tentu menambah beban pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah terus melakukan upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang direalisasikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini diterbitkan pada 7 Maret 2025 dan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah di Indonesia melalui program yang terpadu dan sinergi, serta melalui kerja sama antar stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.

Penanggulangan kemiskinan selama ini berfokus pada konsep kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanna yang diukur dari sisi pengeluaran pendapatan. Jadi, definisi “penduduk miskin” adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan konsep tersebut menandakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yaitu dengan mendorong peningkatan pendapatan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

Ketimpangan pembangunan ekonomi berdampak pada parahnya kesenjangan dan kemiskinan, di mana banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada penduduk miskin (Syawie, 2011). Hal ini berkaitan erat dengan kegagalan sebagian besar program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan akibat terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan (Prawoto, 2009). Sementara terkait pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan optimal dalam mengentaskan tingginya angka masyarakat miskin karena desain program yang kurang tajam (Sutikno, 2020).

Kota Semarang menjadi salah satu kota yang menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Kepadatan penduduk di Kota Semarang akibat dampak urbanisasi menyebabkan tingginya angka kemiskinan di kota tersebut. Namun menurut data BPS Kota Semarang, tingkat kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2025 mencapai 3,80% dan merupakan angka terendah sepanjang periode 2015-2025 (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025). Jumlah penduduk miskin berjumlah 74,36 ribu orang, menurun dari 4,03% atau sekitar 77,79 ribu orang pada tahun 2024. Penurunan ini setara dengan 3,43 ribu orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam satu tahun.

Pemerintah Kota Semarang bermaksud mengentas kemiskinan melalui program “Gerbang Hebat” atau akronim dari “Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Edukasi Ekonomi, Ekosistem, dan Etos Bersama Masyarakat”, yang kemudian diimplementasikan dengan program kampung tematik ini. Kampung tematik

dirancang dibawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Dengan program kampung tematik ini menjadi upaya pemberdayaan masyarakat (Syarif N. H & Wijaya A, 2019). Kampung Tematik di Kota Semarang ini di design sebagai salah satu *pilot project* untuk penataan infrastruktur wilayah serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Harapannya dengan program Kampung Tematik ini akan membentuk kemandirian masyarakat untuk dapat melanjutkan program pemerintah ini dengan baik.

Pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang di dasarkan pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kampung Tematik. Dijelaskan di dalamnya bahwa kampung tematik ini merupakan suatu wilayah pemukiman dibawah administrasi kelurahan yang menunjukkan identitasnya melalui suatu potensi masyarakat atau wilayahnya berdasarkan kesepakatan bersama. Kloczko Gajewska (2014) mendefinisikan kampung tematik atau desa tematik sebagai suatu wilayah yang dikembangkan oleh masyarakat setempatnya berdasarkan ciri khas wilayah tersebut sehingga udah dikenali sebagai suatu identitas. Tujuan dari kampung tematik ini sendiri adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di suatu wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan, serta menambah tujuan atau destinasi wisata di suatu daerah. Kampung tematik ini biasanya identik dengan adanya hiasan berupa gambar mural pada tiap rumah di permukiman tersebut (Sukowati, 2022).

Sejak tahun 2016, sudah ada sekitar 269 kampung tematik yang tersebar di 177 kelurahan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan dana Rp 200 juta untuk setiap kampungnya.

Terakhir, pada tahun 2022, Pemerintah Kota Semarang menambah 10 kampung tematik baru (Agus AP, 2022). Dilansir dari [website resmi kampungtematik.semarangkota.go.id](http://website.resmi.kampungtematik.semarangkota.go.id) (*Data Kampung Tematik, n.d.*) terdapat 10 Kampung Tematik Unggulan di Kota Semarang diantaranya Kampung Batik Rejomulyo, Kampung Ijo, Kampung Jajan Pasar Gajahmungkur, Kampung Sego (Segala Olahan) Angkringan, Kampung Alam Malon, Kampung Bakul Gilo Gabahan Semarang Tengah, Kampung Tematik Bonsai, Kampung Tematik Konveksi, Kampung Petis dan Mangut Tambakharjo, dan Kampung Tematik Misoa (Mie, Doto, Ayam). Namun, kesepuluh Kampung Tematik Unggulan tersebut bukanlah fokus dalam penelitian ini, melainkan Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah yang menjadi salah satu kampung tematik yang terdaftar sejak tahun 2016 atau sejak tahun pertama program kampung tematik ini dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah ini berlokasi di wilayah RW 7 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Ditetapkannya kampung tematik tahu tempe di wilayah RW 7 ini didasari oleh potensi wilayah di RW 7 yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pengrajin tahu dan tempe, sehingga kemudian diajukan menjadi sebuah kampung tematik. Dikutip dari [website resmi kecsmgselatan.semarangkota.go.id](http://website.resmi.kecsmgselatan.semarangkota.go.id) (*Kampung Tematik Gumregah Lamper Tengah, n.d.*), tujuan dibentuknya kampung tematik tahu tempe di wilayah ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi ibu-ibu rumah tangga disekitarnya dan sebagai salah satu upaya penataan lingkungan yang lebih asri, hijau, bersih, dan sehat.

Bukan tanpa alasan dan indikator yang tidak jelas, kampung tahu tempe Gumregah ini ditetapkan menjadi kampung tematik oleh Bappeda Kota

Semarang, melainkan karena karakteristik berwirausaha para pelaku usaha tahu tempe disini yang cukup baik. Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah ini memiliki karakteristik pengelolaan usaha yang relatif lebih maju dibandingkan sentra tahu tempe lainnya. Sebagian pelaku usaha di kampung ini menggunakan kedelai impor yang didatangkan dari Tiongkok serta menerapkan sistem pengolahan bahan baku yang lebih detail, seperti proses pembersihan kedelai hingga benar-benar bersih dan pengupasan kulit kedelai sebelum diolah. Proses tersebut berimplikasi pada kualitas produk yang dihasilkan, di mana tempe memiliki daya tahan yang lebih lama dan kualitas yang lebih stabil. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya peningkatan mutu produksi yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.

Selain itu, Kampung Tematik Tahu Tempe menunjukkan tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap kegiatan penelitian. Pelaku usaha memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan kunjungan langsung serta uji coba pada proses pembuatan tahu dan tempe di lokasi produksi. Keterbukaan ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang lebih mendalam terkait proses produksi, pengelolaan usaha, serta praktik yang diterapkan di lapangan, sehingga meningkatkan validitas dan kedalaman analisis penelitian.

Pada aspek pengelolaan lingkungan, kampung ini juga memiliki keunggulan melalui penerapan sistem saluran pembuangan limbah cair yang didesain dengan penyaringan berlapis. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi dampak limbah hasil produksi terhadap lingkungan sekitar. Selain limbah cair, limbah padat hasil produksi tahu dan tempe tidak sepenuhnya dibuang, melainkan dimanfaatkan kembali sebagai bahan tambahan pakan ternak. Pemanfaatan limbah padat tersebut dilakukan melalui kemitraan dengan peternak sapi dan kambing, sehingga menciptakan hubungan

ekonomi yang saling menguntungkan sekaligus mendukung prinsip pengelolaan usaha yang lebih berkelanjutan.

Di sisi kelembagaan, Kampung Tematik Tahu Tempe masih memiliki paguyuban pelaku usaha yang bertahan dan berfungsi, baik secara struktural maupun operasional. Keberadaan paguyuban ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi, serta penguatan solidaritas antar pelaku usaha, sekaligus berperan sebagai aktor lokal dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi di kampung tersebut. Kondisi ini membedakan Kampung Tematik Tahu Tempe dari kampung tematik lain yang cenderung mengalami pelemahan kelembagaan setelah program berjalan.

Pembentukan kampung tematik di wilayah RW 7 kelurahan Lamper Tengah ini masih banyak menghadapi kendala. Berdasarkan keterangan dari Chandra (20 tahun) kurangnya partisipasi aktif dari pihak pemerintah untuk memberikan pelatihan dan dukungan terhadap usaha yang dikembangkan di kampung ini yaitu tahu tempe. Pemberdayaan yang ada banyak datang dari pihak akademisi yaitu melalui kegiatan penelitian dan kuliah kerja nyata dengan wilayah RW 7 ini menjadi mitranya. Selain itu, masih belum adanya desain keberlanjutan yang jelas dari program ini, sehingga setelah dilakukan perbaikan infrastruktur wilayah dan penambahan gang sebagai bentuk *labelling* kampung tematik di daerah tersebut, maka ditahun-tahun berikutnya program tersebut tidak berkelanjutan. Akibat tidak adanya kelompok usaha yang memfasilitasi pengembangan usaha tahu tempe disana, para pengusaha tahu dan tempe yang ada di wilayah RW 7 ini mengembangkan usahanya secara mandiri. Pengelolaan infrastuktur juga tidak dilakukan dengan baik oleh pemangku kepentingan setempat, sehingga tidak adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk menjaga keindahan kampung seperti pada saat awal program dimulai.

Program kampung tematik ini di desain dengan tujuan peningkatan pendapatan bagi sasaran penerimannya sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan dan juga pengangguran. Namun sampai sekarang justru lebih banyak kampung tematik yang tidak berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan penelitian guna mengevaluasi secara kualitatif bagaimana pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk mencapai dampak perekonomian yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan potensi solusi yang dapat memperkuat keberlanjutan dan dampak positif program Kampung Tematik sebagai solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

KAJIAN TEORI

a. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan memberikan informasi terkait kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh keterbutuhan dan nilai atau kesempatan yang dapat dicapai melalui tindakan public (Dunn, 2003). Dalam evaluasi kebijakan, terdapat beberapa model yang dikembangkan. William N Dunn (2003) menyebutkan ada 6 kriteria yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas, untuk mengetahui ketercapaian hasil dari program yang telah diimplementasikan.
2. Efisiensi, untuk mengukur usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
3. Kecukupan, untuk menganalisis seberapa jauh pencaaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah.
4. Perataan, untuk memastikan pemerataan distribusi biaya dan manfaat bagi semua kelompok.
5. Responsivitas, untuk mengidentifikasi kepuasan kebutuhan dari kebijakan yang dihasilkan.

6. Ketepatan, untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai memiliki nilai yang berguna.

b. Program Kampung Tematik

Kampung Tematik merupakan sebuah kawasan di bawah kelurahan yang mencerminkan identitas, karakter, serta nilai-nilai masyarakatnya melalui pengembangan potensi lokal yang dipilih dan disepakati bersama oleh warga. Tujuan utama dari program Kampung Tematik antara lain:

1. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal;
2. Mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih layak dan berkualitas;
3. Menggali serta menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan potensi dan penyelesaian persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pelaksanaan program kampung tematik di Kota Semarang dilandasi oleh Peraturan Walikota Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Tematik. Perkembangan kampung tematik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023, jumlah kampung tematik di Kota Semarang yaitu sebanyak 269 kampung tematik yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan program kampung tematik dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di Kampung Tahu Tempe, Lamper Tengah, Kota Semarang. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Staff Bappeda Kota Semarang, Lurah Lamper Tengah, Ketua

RW 7 Lamper Tengah, Ketua RT, Ketua PKK, dan Pengrajin Tahu Tempe.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kredibilitas dan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Kampung Tematik Dalam Mendorong Peningkatan Perekonomian Masyarakat Studi Di Kampung Tematik Tahu Tempe Kota Semarang

a. Efektivitas

Berdasarkan temuan lapangan, efektivitas program kampung tematik di wilayah RW 7 ini belum tercapai. Program Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah di Lamper Tengah pada dasarnya dirancang sebagai instrument peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, sejalan dengan tujuan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menurunkan angka kemiskinan. Meskipun program ini memiliki dasar regulasi yang kuat dan telah diterapkan secara luas di Kota Semarang, hasil temuan menunjukkan bahwa efektivitasnya di RW 7 Lamper Tengah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program akibat sosialisasi yang tidak merata, sehingga partisipasi warga tidak berkembang secara signifikan. Selain itu, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi tidak berasal dari intervensi program, melainkan lebih

dipengaruhi oleh tingginya permintaan asar dan perkembangan usaha pelaku industri yang sudah berjalan sebelum program dilaksanakan.

Disisi lain, bantuan dana sebesar Rp 200 juta yang diberikan pemerintah tidak memberikan dampak jangka panjang karena penggunaannya lebih banyak berfokus pada pembangunan fisik seperti gapura dan mural yang tidak memiliki keberlanjutan perawatan. Infrastruktur pendukung yang tidak terpelihara dan ketiadaan regenerasi pelaku usaha di luar lingkup keluarga turut memperlemah kontribusi program terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Dampak pemberdayaan juga terbatas karena Sebagian besar usaha tetap dikelola secara turun-temurun dan tidak mendorong munculnya pelaku usaha baru. Dengan demikian, tingkat efektifitas program dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masih rendah, dan kampung tematik ini tidak menunjukkan perkembangan signifikan sebagai Kawasan tematik yang mampu menggerakkan perekonomian warga secara luas.

b. Efisiensi

Pelaksanaan program Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah menunjukkan bahwa aspek efisiensi dalam penggunaan sumber daya sudah berjalan melalui perencanaan yang dilakukan satu tahu sebelumnya, meliputi musrenbang, verifikasi, hingga penetapan anggaran. Dana maksimal Rp 200 juta dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa gapura, pengaspalan jalan, serta elemen estetika kawasan, dan sebagian digunakan untuk kegiatan pemberdayaan seperti sosialisasi serta pelatihan inovasi olahan tahu tempe. Pelatihan teknis produksi justru lebih banyak diberikan oleh pengrajin kepada pekerja internal, bukan oleh pemerintah. Pelatihan dari pihak luar seperti akademisi lebih berfokus pada pengolahan limbah serta inovasi produk. Terkait transparansi penggunaan

dana tersebut belum merata karena hanya diketahui oleh Ketua RW pada masa itu, sementara perangkat lain serta masyarakat kurang memperoleh akses informasi.

Dari sisi pengawasan, monitoring dan evaluasi belum berjalan efisien karena tidak dilakukan secara rutin dan hanya dilaksanakan apabila diminta oleh BAPPEDA. Meskipun terdapat pendampingan dari OPD terkait seperti Dinas Perindustrian, fokus monitoring lebih banyak pada aspek produksi daripada evaluasi hasil program. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya berjalan baik pada bagian perencanaan dan pelaksanaan fisik, tetapi belum optimal dalam transparansi, pemerataan informasi, dan keberlanjutan program.

c. Kecukupan

Kecukupan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di Kampung Tematik Gumregah belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan ekonomi para pelaku usaha tahu tempe. Distribusi bantuan belum merata untuk seluruh pelaku usaha. seperti fasilitas mesin pemecah kedelai yang diberikan hanya diterima oleh sebagian pengrajin, sementara lainnya tidak memperoleh bantuan sama sekali. Bantuan infrastruktur seperti saluran pembuatan limbah juga tidak berjalan optimal karena adanya penolakan terhadap desain yang dinilai tidak sesuai kondisi rumah warga, sehingga para pengrajin membangun system pengolahan limbahnya secara mandiri. Selain itu, pemerintah tidak menyediakan bantuan modal, dan akses pembiayaan bergantung pada KUR bank atau proposal mandiri ke Dinas Koperasi.

Disisi kelembagaan dan dukungan teknis, pembentukan paguyuban pelaku usaha serta komunitas UMKM belum diikuti dengan pelatihan, pendampingan, atau penguatan organisasi, sehingga keduanya cenderung pasif dan tidak memiliki peran strategis dalam pengembangan usaha. Pemasaran produk

sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pelaku usaha tanpa dukungan promosi, *database*, ataupun perluasan akses pasar dari kelurahan maupun dinas terkait. Pelaku usaha berharap adanya dukungan lanjutan seperti akses modal, stabilitas harga kedelai, kolaborasi pemasaran, dan promosi kawasan sebagai sentra produksi tahu tempe. Secara keseluruhan, kecukupan sumber daya program kampung tematik masih rendah karena bantuan yang tersedia tidak terdistribusi merata, pendampingan tidak berkelanjutan dan belum mampu membangkitkan kesadaran masyarakat, serta belum adanya fasilitas komprehensif yang mampu mendorong kemandirian ekonomi warga sesuai tujuan program kampung tematik.

d. Perataan

Pelaksanaan program kampung tematik di wilayah RW 7 ini menunjukkan bahwa manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan yang ada tidak berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Program lebih banyak berfokus pada pelaku usaha tahu dan tempe sebagai sasaran utama program, sehingga masyarakat umum diluar sektor tahu tempe tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program kampung tematik tersebut. Minimnya partisipasi masyarakat berimplikasi pada kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga pemeliharaan fasilitas hanya dilakukan secara sporadic dan terbatas, seperti sebatas pengecatan ulang gapura. Selain itu, banyak warga yang tidak memahami esensi maupun mekanisme program, sehingga informasi mengenai kampung tematik hanya beredar di kalangan pelaku usaha tau tempe, sementara masyarakat lain tidak merasakan dampak ekonomi maupun sosial yang cukup signifikan.

Temuan lapangan juga menegaskan bahwa label kampung tematik tidak

mampu memperluas manfaat hingga mencakup seluruh kelompok masyarakat. Pelaku usaha tahu tempe berkembang lebih karena usaha mandiri, bukan karena dukungan program, bahkan jumlah pengrajin tahu menurun hingga saat ini hanya tersisa satu pengrajin tahu se-wilayah RW 7 Lamper Tengah. Disisi lain, Sebagian besar warga justru bekerja di luar sektor tahu tempe, seperti UMKM, kos-kosan, dan usaha makanan, yang tidak tersebut oleh tema program kampung tematik ini. ketidakseimbangan distribusi manfaat ini menunjukkan bahwa perataan program sangat rendah, karena dampak yang muncul tidak mampu mendorong perubahan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan tidak menumbuhkan minat baru untuk bergabung dalam usaha tahu tempe. Dengan demikian, program kampung tematik belum berhasil menciptakan perataan manfaat bagi seluruh warga RW 7.

e. Responsivitas

Secara konseptual, program ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat karena mengangkat kekhasan lokal yang telah berkembang sebelumnya. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa relevansi tersebut belum diikuti dengan kegiatan yang benar-benar menjawab kebutuhan utama pelaku usaha. Program lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan revitalisasi lingkungan, sementara kebutuhan spesifik seperti pelatihan peningkatan produksi, pemasaran, penguatan kelembagaan, hingga bantuan modal tidak terpenuhi. Ketiadaan biaya perawatan juga membuat hasil pembangunan tidak berkelanjutan dan tidak berdampak pada pengembangan usaha masyarakat.

Selain itu, responsivitas program turut terhambat oleh lemahnya kapasitas dan kesadaran pelaku usaha dalam mengelola paguyuban yang menjadi wadah pengembangan usaha. Kurangnya pengalaman berorganisasi menjadikan

paguyuban bersifat pasif dan tidak mampu merancang program yang dapat menampung aspirasi serta kebutuhan pelaku usaha tahu tempe. Bantuan pemerintah terkait pengembangan usaha terbatas pada pemberian mesin pemecah kedelai di awal program, sementara aspek penting lainnya seperti kualitas produk dan pemasaran sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing pengrajin. Pemerintah hanya melakukan pemantauan standar bahan baku tanpa memberikan solusi yang adaptif terhadap dinamika pasar. Secara keseluruhan, tingkat responsivitas program masih rendah karena belum mampu menyediakan dukungan yang sesuai kebutuhan nyata, tidak mendorong keberlanjutan, serta belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengembangan kampung tematik.

f. Ketepatan

Secara konsep, program ini tepat sasaran karena mengangkat potensi yang telah lama berkembang dan menjadi identitas wilayah. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa proses identifikasi kebutuhan tidak dilakukan secara mendalam. Pelaku usaha tidak dilibatkan dalam perencanaan, penyusunan RAB, maupun diskusi kebutuhan, sehingga strategi dan kegiatan yang dirancang tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan riil para pengrajin. Kurangnya koordinasi ini membuat penggunaan anggaran cenderung diarahkan pada pembangunan fisik, padahal dana tersebut juga dapat digunakan untuk pelatihan, peningkatan kapasitas, atau bantuan yang lebih mendukung pengembangan usaha.

Lebih jauh, ketepatan program turut melemah karena indikator keberhasilan yang digunakan pada awal pelaksanaan masih bersifat umum dan *top-down*, sehingga penilaian keberhasilan tidak didasarkan pada data yang jelas. Bantuan yang diberikan pada tahun pertama memang selaras dengan tema, seperti mesin pengelolaan kedelai dan juga

pelatihan, tetapi kegiatan tersebut setelah anggaran tahun berjalan habis. Monitoring penguatan kelembagaan, serta kunjungan dinas yang terbatas menyebabkan keberlanjutan program tidak terkelola dengan baik. meskipun tema sudah tepat, kurangnya pelibatan pelaku usaha, lemahnya koordinasi, dan minimnya tindak lanjut membuat ketepatan program tidak sepenuhnya tercapai dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Aspek-aspek yang Mempengaruhi

Evaluasi program kampung tematik di Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah menyoroti beberapa aspek yang mempengaruhi keberjalanan program tersebut, diantaranya adalah 1) Dukungan pemerintah, 2) Penerimaan masyarakat, 3) Kemampuan SDM, 4) Komunikasi, 5) Kepemimpinan, 6) Partisipasi masyarakat.

a. Dukungan Pemerintah

Dana program yang diberikan dipergunakan untuk pembangunan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia yang lebih baik. Bantuan untuk pengembangan usaha tahu tempe juga diturunkan sebagai bentuk dukungan pemerintah atas program kampung tematik ini yaitu berupa pemberian mesin pemecah kedelai. Selain itu, pemerintah juga turut mendukung melalui pembentukan paguyuban UMKM sebagai koordinator masyarakat yang akan menjadi keberlanjutan dari program kampung tematik di wilayah RW 7 ini. Berbagai macam bentuk penggunaan dana tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program kampung tematik yang ada.

b. Penerimaan Masyarakat

Meskipun orientasi dampaknya tidak kepada seluruh warga wilayah RW 7, namun sebagian besar masyarakat disana menerima dengan baik adanya program kampung tematik ini. Utamanya bagi para pelaku usaha tahu tempe yang terlibat, program ini dijadikan peluang untuk membantu peningkatan usaha

mereka. Bermodalkan penerimaan yang baik dari masyarakat setempat, program kampung tematik dapat berjalan dengan baik di wilayah RW 7.

c. Kemampuan SDM

Temuan lapangan terkait kemampuan SDM ditunjukkan dari kemampuan pihak kelurahan Lamper Tengah dalam mengelola anggaran dana program yang diberikan. Pada awal pembentukan program dan pengajuan proposal pengajuan menjadi kampung tematik, Kelurahan Lamper Tengah tidak melakukan koordinasi untuk seluruh pelaku usaha tahu tempe guna menyelaraskan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku usaha tahu tempe disana. Alhasil, pengalokasian dana lebih diperuntukan untuk pembangunan fisik ketimbang untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia disana. Selain itu, kurangnya transparansi pengelolaan anggaran, karena informasi detailnya hanya dikomunikasikan kepada Ketua RW 7 pada waktu itu, sedangkan perangkat RW yang lain seperti sekretaris dan bendahara tidak diberitahu secara lebih jelasnya. Hal ini jelas menjadi penghambat karena pengelolaan dana anggaran yang tidak baik menyebabkan kurang tepatnya penggunaan dana program tersebut.

d. Komunikasi

Buruknya komunikasi yang terjalin berakibat pada kepemimpinan yang buruk pula. Kepemimpinan di Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah ini merujuk pada Ketua RW 7, karena paling berperan penting dalam pelaksanaan program khususnya pengelolaan anggaran. Orientasi peran kepemimpinan Ketua RW 7 ini terlihat hanya pada pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik seperti gapura, selebihnya terkait pelatihan dan bantuan-bantuan lainnya tidak diinformasikan melalui Ketua RW 7 melainkan langsung kepada para pelaku usaha tahu tempe atau kepada paguyuban UMKM yang ada. Kepemimpinan

paguyuban UMKM juga belum menunjukkan kemampuan yang cukup baik karena pada dasarnya pemilihannya didasarkan pada peran tokoh masyarakat yang dianggap sebagai tokoh adat disana.

e. Kepemimpinan

Terkait komunikasi, yang pada hal ini merujuk pada tidak dilibatkannya masyarakat setempat khususnya untuk para pelaku usaha sebagai sasaran utama program tersebut didalam proses perencanaan program. Tidak ada komunikasi yang jelas antara pihak kelurahan dengan para pelaku usaha sebelumnya, sehingga para pelaku usaha mengetahui pada saat program mulai dilaksanakan melalui sosialisasi. Komunikasi hanya dilakukan secara satu arah yaitu kepada Ketua RW 7 tahun itu, yang kemudian tidak disampaikan lebih lanjut pada perangkat RW yang lain. Akibatnya, kegiatan program tidak menjawab kebutuhan para pelaku usaha tahu tempe.

f. Partisipasi Masyarakat

Dibalik penerimaan masyarakat atas keberjalanan program, tidak semua masyarakat memiliki atensi yang sama untuk menjadi pelopor keberlanjutan program ini. Minimnya kesadaran masyarakat terutama yang tergabung dalam paguyuban menyebabkan paguyuban UMKM hasil usulan Dinas Perindustrian di Lamper Tengah tersebut hanya bergerak pasif. Selain itu kurangnya pengalaman berorganisasi dan perbedaan tingkat pendidikan juga menjadi salah satu penyebab paguyuban UMKM tersebut belum mampu menjadi koordinator yang baik untuk program kampung tematik disana. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia tersebut menjadi penghambat bagi pengelolaan program terutama dalam hal keberlanjutannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi menurut William Dunn (2003), pelaksanaan program di Kampung Tematik Gumregah belum

mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakatnya secara signifikan dan berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Efektivitas program tidak tercapai karena bantuan yang diberikan belum menysasar kebutuhan utama pelaku usaha dan tidak menghasilkan peningkatan ekonomi yang signifikan.
2. Efisiensi program tidak tercapai karena pengelolaan dana lebih difokuskan kepada pembangunan asset fisik disbanding untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun kelembagaan.
3. Kecukupan program rendah karena bantuan tidak merata diterima oleh pelaku usaha dan lemahnya dukungan kelembagaan.
4. Perataan program rendah karena orientasi program hanya pada sasaran utama dan manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.
5. Responsivitas program rendah karena ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga menjadi tidak fleksibel.
6. Ketepatan program rendah karena ketidaktepatan implementasi program dengan tujuannya untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Dalam keberjalanannya, terdapat dua aspek yang berperan sebagai pendukung pelaksanaan Kampung Tematik Gumregah, yaitu dukungan pemerintah dan penerimaan masyarakat. Disisi lain, keberhasilan program masih terhambat oleh sejumlah aspek, yaitu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, komunikasi yang belum efektif, kepemimpinan yang kurang optimal, dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat.

REKOMENDASI

Berikut beberapa rekomendasi untuk upaya perbaikan program di masa mendatang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai efektivitas, program perlu memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang menysasar langsung pada kebutuhan utama pelaku usaha, seperti permodalan, akses bahan baku, serta pendampingan usaha agar berdampak nyata pada peningkatan ekonomi.
2. Untuk mencapai efisiensi, sebaiknya penggunaan dana program didominasi untuk penguatan kapasitas pelaku usaha dan kelembagaan lokal.
3. Untuk mencapai kecukupan, maka distribusi bantuan harus merata dan berbasis kebutuhan riil pelaku usaha, serta diimbangi dengan pengawasan pelaksanaan program.
4. Untuk mencapai perataan, program harus dirancang untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan lebih luas bukan hanya kelompok sasaran.
5. Untuk mencapai responsivitas, maka harus rutin melakukan monitoring untuk menganalisi kebutuhan pelaku usaha dan evaluasi untuk menyusun perbaikan program.
6. Untuk mencapai ketepatan, maka harus dilakukan penelarasan implementasi dengan tujuan utama pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abhayawansa, S., Donovan, J., Le, V., Masli, E., & Topple, C. (2024). *Beyond Borders: Evaluating The*

- Real Impact Of An Asia-Based Short-Term Study-Abroad Program For A Business Capstone Unit. *The International Journal Of Management Education*, 22(2), 100965.
- Agarwal, S. K., & Mishra, S. (2024). Health Impact Evaluation Of Aspirational Districts Program In India: Evidence From National Family Health Survey. *Economics & Human Biology*, 54, 101411.
- Agatha, C. (2023). Evaluasi Dampak Program Bantuan Air Bersih Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Anggraini. NLV, & Ulum. MC. (2020). *Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Penerbit UB Press.
- Antara Jateng. (2025, 24 Juli). BPS: Penduduk miskin Jateng setahun terakhir turun 33.764 ribu orang.
- Antara Kalteng. (2025). BPS catat garis kemiskinan di Indonesia Maret 2025 tembus Rp609.160 per kapita per bulan.
- Badan Pusat Statistik. (2025, 15 Januari). Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen.
- Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen..
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2025, 16 Oktober). Kemiskinan Kabupaten Semarang Maret 2025.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2025, 24 September). Kemiskinan Kota Semarang 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). BPS: Jumlah orang miskin RI 23,85 juta, terendah dalam 2 dekade.
- Berita Antara. (2025). BPS: Jumlah penduduk miskin Jateng turun 33.764 ribu orang.
- Cahyono, A. H. E., & Mustofa, A. (2023). Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sebagai Penanganan Kumuh Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(2), 161-168.
- CNBC Indonesia. (2025, 17 Januari). Masyarakat miskin RI tersisa 24,06 juta orang, terbanyak ada di sini.
- CNN Indonesia. (2025, 25 Juli). BPS tetapkan garis kemiskinan cuma Rp20.305 per hari, kok bisa?
- CNN Indonesia. (2025, 25 Juli). Data terbaru BPS: Angka kemiskinan dan kemiskinan turun.
- Del Boca, D., Pronzato, C. D., & Schiavon, L. (2024). The Impact Evaluation Of Short Repeated Programs: The Case Of Parenting Skills Programs. *Evaluation And Program Planning*, 106, 102476.
- Goodstats.id. (2025). Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,47% pada Maret 2025.
- Hidayat, RK, Mulyana, A., & Kurniawan, A. (2024). Evaluasi kebijakan Sabilulungan 1000 kampung Kabupaten Bandung. *Dialog: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4 (1), 49–62.
- Jendela Inovasi Kota. (n.d.). Retrieved from Kampung Tematik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: <https://devjelita.semarangkota.go.id>
- JPTAM. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tematik Jamrut melalui Budidaya Perkebunan di Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati JPTAM (Volume, 7 Nomor 2, halaman 11782-11792).
- Jurnal Ilmiah Wawasan Pemerintahan. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Tematik Runway pada Budidaya Melon dan Ulat Maggot di Desa Rawa Rengas

- Kecamatan Kosambi Kabupaten Tengerang.
- Jurnal Planning for Urban Region and Environment. (2022). Keberlanjutan Aset Penghidupan Kampung Tematik Terkait Program Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kumuh. Jurnal PURE, Volume (11 Nomor 2).
- Kampung Tematik. (N.D.). Retrieved From Kampung Tematik Kota Semarang: Kampungtematik.Semarangkota.Go.Id
- Keiser, M., Kodjebacheva, G. D., & Kandasamy, D. (2023). Evaluating The Impact Of A Multifaceted Distracted Driving Prevention Program. Journal Of Emergency Nursing, 49(4), 513-519.
- Kelurahan Lamper Tengah . (N.D.). Retrieved From Kampung Tematik Gumregah: <https://Kecsmgselatan.Semarangkota.Go.Id/Tematik-Lampertengah>
- Kontan.co.id. (2025). BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 23,85 juta orang pada Maret 2025.
- Kurniawan, A. (2025). Kawasan Kumuh Di Jateng Capai 5.000 Hektar, Sukoharjo Peringkat Teratas! Semarang: Espos.Id.
- Octavia, R. (2022). Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Orbeta, A. C., Melad, K. A. M., & Araos, N. V. V. (2021). Reassessing The Impact Of The Pantawid Pamilyang Pilipino Program: Results Of The Third Wave Impact Evaluation (No. 2021-05). Pids Discussion Paper Series.
- PPID Jawa Tengah. (2025). Maret 2025: Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah turun jadi 9,48 persen.
- Prof. Dr. Yeremias T.Keban, S. M. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media.
- Prayoga, D. K. (2021). Evaluasi Dampak Program Bantuan Bibit Lele Dan Hidroponik Oleh Corporate Social Responsibility (Csr) Korindo Group Di Kelurahan Pancoran (Bachelor's Thesis, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ria, D. A. (2019). Evaluasi Dampak Program Kampung Produktif Di Kota Sawahlunto Studi Pada Dusun Kayu Gadang (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Rizqia, A. (2020). Judul tugas akhir [Tugas akhir, Universitas Islam Negeri Walisongo].
- Romdana, dkk. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Pengabdian Bumi Raflesia , Volume (3 Nomor 3).
- Solu Nor Amaya, A. M. (2024). Dampak Urbanisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kota. Risoma : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 116-126.
- Suara Merdeka. (2025). Kemiskinan Kota Semarang menyentuh titik terendah 3,80 persen, namun garis kemiskinan melonjak.